

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI SMP NEGERI 1 DOPLANG BLORA
TAHUN 2021

Oleh

Asih Sulistyowati

Program Studi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: asihsulistyowati14@gmail.com

Abstract

SMP Negeri 1 Doplang, Blora a school with various kinds of characteristics of teachers and employees in it. The research is done by using the methods of research descriptive qualitative, with technique collection of data that is observation, interview and documentation. The data obtained were then analyzed into a conclusion from the research process using the theory of Public Policy Implementation according to George C. Edwards III. From research obtained the results that indicators of communication has been implemented with effective. Indicators of resource human, there are less effective due to the limited ability of the competence and the factors of age, while the budget that is available on the agency that is already sufficient, disposition policies has been run by both implementing the policy already implementing the commitmen of each, as well as indicators of system bureaucracy implemented effectively.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures*

Pendahuluan

Sumberdaya manusia adalah kunci utama dari pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang tersedia, maka peran pemimpin untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai sangat penting. Sumberdaya yang berkualitas merupakan sumberdaya yang memiliki ketrampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Setiap lembaga atau instansi membutuhkan pegawai yang memiliki kepribadian yang tinggi dan memiliki kemampuan serta kecakapan dalam mengambil keputusan. Penerapan disiplin bertujuan agar kedisiplinan dapat

ditingkatkan oleh para pegawai di lembaga atau instansi.

Kebijakan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Blora diharapkan mampu menciptakan motivasi disiplin kerja yang tinggi di setiap diri pegawai, sehingga dengan motivasi tersebut akan timbul semangat kerja yang mampu meningkatkan disiplin kerja pegawai. “Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa

program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”¹⁵. Kebijakan publik yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan¹⁶.

Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan *derivasi* kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Proses kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, *forecasting*,

rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan¹⁷. Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan¹⁸.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

15 George C. Edward III dan Ira Sharkansky. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.

16 Konsep Dasar Kebijakan Publik
http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/02/konsep-dasar-kebijakan-publik_11.html?m=1

17 A.G. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

18 Rafi'i Akhmad. 2020. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)*. Jurnal Administrasi Publik Vol.6 No.1 Februari 2020.

Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya¹⁹.

Fauzi Kusmin dalam academia.com, Implementasi kebijakan sangat penting bagi keberhasilan pemerintah. Tidak ada kebijakan yang bisa berhasil jika implementasi tidak menimbulkan hubungan apapun dengan maksud pengadopsi kebijakan. Memahami proses implementasi dimana kesulitan dan hasil pembuatan kebijakan publik. Implementasi pada dasarnya adalah tentang mencoba mencapainya suatu tujuan. Implementasi merupakan inti dari disiplin administrasi publik dan bertujuan untuk berkontribusi dalam praktik kebijakan. Proses pelaksanaan implementasi menitikberatkan pada sistem atau mekanisme perencanaan. Model implementasi kebijakan publik meliputi 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat (4) variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi⁵.

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*).

b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya manusia adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi semua kelompok sasaran. indikator sumberdaya

¹⁹ Agustino, Leo.2008. *Dasar-Dasar*

terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut: Staf merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Informasi sangat penting dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, serta fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.
4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri²⁰. Pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi²¹.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada 2 (dua) langkah yang dilakukan, yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program
- b. Melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut²².

Kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah ditetapkan, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada hasil bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi²³.

Dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengertian Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pelanggaran Kode Etik disebut pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan yang bertentangan dengan

20 Ramdhani. Abdullah & Ramdhani Ali Muhammad. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik II*.

21 Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi. Penyelenggaraan Daerah*. Bandung. Alfabeta.

22 Kadji, Yulianto, 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo Press.

23 -----

butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS²⁴. Dalam BAB II Pasal 2 disebutkan, Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Blora mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan mengenai pelanggaran kode etik PNS. Kebijakan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan Kode Etik PNS. Hambatan tersebut berupa kedisiplinan, komitmen, kemampuan intelektual pegawai, sehingga peneliti mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Metode

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mempunyai maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis data serta informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Doplang, Jalan Doplang-Kundur Km.1, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora pada bulan Mei-Juni tahun 2021.

Unit analisis dalam penelitian Implementasi Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Doplang, adalah Guru PNS di SMP Negeri 1 Doplang, Blora. Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam teknik *purposive sampling* memilih subyek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan kekuatan akurasi. Sedangkan untuk menambah kredibilitas data, menggunakan teknik *snowball sampling* yang bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan²⁵.

Penentuan sampel melalui teknik ini tepat digunakan untuk mengkaji sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang pada dasarnya adalah sebuah lembaga formal yang telah memiliki struktur organisasi yang baik. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel yang diinginkan sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal

24 Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

25 Lofland dan Lofland (dalam Maleong, 2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

bukan dalam bentuk angka²⁶. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya sekolah, letak geografis obyek, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, daftar hadir guru, jurnal kelas, buku daftar perangkat pembelajaran, buku penilaian siswa, Sasaran Kinerja Pegawai.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data dua sumber yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹². Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer adalah informan, PNS di SMP Negeri 1 Doplang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen¹². Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi kegiatan di sekolah. Data sekunder ini bersifat mendukung keperluan data primer seperti sejarah singkat berdirinya sekolah, letak geografis obyek, visi dan misi,

keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, daftar hadir guru, jurnal kelas, buku daftar perangkat pembelajaran, buku penilaian siswa, Sasaran Kinerja Pegawai.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian pada keadaan sebenarnya²⁷.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Doplang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan¹³.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,

26 Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung. Alfabeta.

27 Guba dan Lincoln (dalam Maleong, 2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya buku perangkat pembelajaran, buku daftar nilai siswa, Sasaran Kinerja Pegawai. Dokumen dalam bentuk gambar misalnya foto dan video. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni lukis, patung, pahat. Dokumen-dokumen ini bersifat sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara²⁸.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain¹⁴. Proses analisis data meliputi aktivitas pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi²⁹. validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), dan *transferability* (validitas eksternal). Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas

eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil¹⁶. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah, triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta menggunakan bahan referensi.

Merupakan sejauh mana pengukuran dari suatu tes atau tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subyek dan dalam kondisi yang sama³⁰. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama dan tidak bisa diandalkan apabila pengukuran berulang memberikan hasil yang berbeda-beda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan topik penelitian baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti juga mendapatkan data dari arsip, buku, dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang terdapat di instansi. Hal ini berfungsi untuk menunjang kelengkapan dari hasil penelitian.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan

28 Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung. Alfabeta.

29 Miles, M.b, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi

3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI Press.

30 Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung. Alfabeta.

implementasi. Empat (4) variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan topik penelitian baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti juga mendapatkan data dari arsip, buku, dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang terdapat di instansi. Hal ini berfungsi untuk menunjang kelengkapan dari hasil penelitian. Dari kegiatan wawancara dapat diketahui bahwa proses komunikasi yang terjadi cukup jelas, hal ini diketahui dari pemahaman beberapa pegawai dalam menyampaikan pengertiannya tentang teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Blora tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Diawal munculnya kebijakan ini, ada beberapa personil yang kurang memahami dan terkesan acuh. Tapi karena adanya komunikasi yang baik, sikap sabar dan tidak putus asa, hingga akhirnya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana dikemukakan George Edward III bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat, agar dimengerti dengan cepat oleh pelaksana kebijakan. Persyaratan utama bagi komunikasi pada kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan

sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi hendaknya bersifat baik dan efektif, sehingga melancarkan proses penerapan implementasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Blora tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Doplang tergolong sudah efektif dan terlaksana dengan baik. Keefektifan komunikasi ini yang menjadikan hasil dari kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat.

2. Sumber Daya

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, bahwa jumlah sumber daya manusia yang terdapat di SMP Negeri 1 Doplang cukup memadai. Dari 31 pegawai yang berstatus PNS, hanya beberapa pegawai yang merasa acuh dengan adanya kebijakan Bupati ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, faktor usia sehingga menyebabkan ketertinggalan pengetahuan atas perkembangan teknologi yang ada. Meskipun begitu, sumberdaya dengan faktor usia yang tergolong bukan lagi muda tetap bersemangat melaksanakan semua kebijakan yang ada. Selanjutnya, dari sumberdaya anggaran, tidak mengalami kendala apapun. SMP Negeri 1 Doplang tergolong sekolah terbesar diwilayah kecamatan Jati, dan hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang ada. Anggaran sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah serta fasilitas sekolah juga tidaklah kurang. Menurut Edward III diketahui bahwa,

apabila para implementor kekurangan beberapa sumber yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak bisa berjalan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia di SMP Negeri 1 Doplang masih ada beberapa yang kurang efektif, belum terlaksana dengan baik namun anggaran yang tersedia di instansi tersebut mencukupi.

3. Disposisi

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa pelaksana implementasi memiliki sikap semangat yang tinggi, memiliki komitmen dan sikap jujur. Ketiganya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dari kegiatan wawancara diketahui bahwa para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Begitu pula sebaliknya, apabila sikap implementor memiliki sikap kurang mendukung, maka implementasi kebijakan pastilah tidak terlaksana dengan baik.

Menurut George Edward, sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan,

maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

Pada awal kebijakan diberlakukan, terdapat beberapa personil yang bersikap acuh terhadap kebijakan tersebut, hal ini diketahui dari kebiasaannya menunda suatu pekerjaan, datang tidak tepat waktu, dan cenderung tidak mematuhi aturan yang berlaku. Tentu saja hal ini menghambat pekerjaan yang lain. Tapi berkat adanya kesabaran, jiwa pantang menyerah hingga akhirnya sikap negative yang terdapat pada personil berangsur berkurang.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan seluruh pelaksana implementasi peraturan Bupati Blora tentang kode etik pegawai negeri sipil memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan tersebut. Bentuk semangat tersebut diantaranya adalah implementor perlahan-lahan melakukan perubahan menjadi lebih baik, merealisasikan maksud dan tujuan kebijakan, sehingga disposisi kebijakan Peraturan Bupati Blora tentang Kode Etik berjalan dan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa dalam melaksanakan kebijakan peraturan bupati Blora tentang kode etik pegawai negeri sipil terdapat SOP yang dibuat oleh Bupati Blora. Menurut George Edward III, dua (2) buah karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (*SOP= Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi. SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap

keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat menerapkan sesuai aturan, mempermudah prosedur kerja dan menerapkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Selain itu, dengan SOP dapat menyeragamkan tindakan atau perbuatan pegawai dalam suatu organisasi sehingga timbul kekompakan antar anggota organisasi, menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar pula dalam menerapkan peraturan yang ada.

Dari hasil wawancara juga diperoleh bahwa fragmentasi tidak ditemui di lingkungan SMP Negeri 1 Doplang dalam pelaksanaan kebijakan ini. Semua berjalan atas dasar niat dan kesadaran pribadi para pelaksana kebijakan. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Blora tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilihat dari variabel birokrasi terlaksana dengan baik, berjalan secara efektif tanpa mengalami kendala sedikitpun.

Menurut George Edward III, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Blora tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Doplang ini tidak semuanya berjalan efektif, untuk variabel komunikasi pada awal muncul peraturan ini masih sering timbul hambatan atau kendala. Hambatan ini berasal dari beberapa oknum pegawai, sehingga

menyebabkan komunikasi menjadi kurang efektif, tetapi pada akhirnya karena komitmen bersama sehingga komunikasi terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan variabel sumberdaya manusianya. Masih dijumpai beberapa pegawai yang acuh, kurang peduli dengan peraturan yang ada dan terkesan masa bodoh. Sedangkan sumberdaya anggaran, tidak mengalami kendala apapun. Untuk variabel disposisi dan variabel sistem birokrasi tergolong efektif. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak. Baik dampak kepada pribadi, masyarakat maupun pada organisasi. Dampak kebijakan peraturan Bupati Blora tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil bagi pribadi pegawai SMP Negeri adalah meningkatkan rasa kedisiplinan dalam bekerja, bertanggungjawab, taat aturan, juga memiliki jiwa sosial serta integritas yang tinggi. Dampak bagi masyarakat, menjadikan citra pegawai menjadi lebih baik, bisa digunakan sebagai panutan/tauladan di lingkungan sekitar. Sedangkan dampak bagi organisasi, tentu saja menciptakan organisasi menjadi lebih maju, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, dan organisasi tetap berada diposisi terdepan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Doplang Blora, dengan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi terlaksana dengan baik dan cukup efektif, baik dari segi transmisi maupun kejelasan. Keefektifan komunikasi menjadikan hasil dari kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan.
2. Sumberdaya anggaran sudah cukup efisien tetapi sumberdaya manusia masih ada beberapa yang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, faktor usia sehingga menyebabkan ketertinggalan pengetahuan atas perkembangan teknologi yang ada.
3. Disposisi Kebijakan Bupati Blora tentang Kode Etik berjalan sangat baik. Implementor perlahan-lahan melakukan perubahan menjadi lebih baik, merealisasikan maksud dan tujuan kebijakan yang dibuat.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi berjalan secara efektif tanpa mengalami kendala sedikitpun, serta tidak ditemukan unsur fragmentasi.

Saran

Saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Bupati Blora tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil harus tetap dilaksanakan, hal ini digunakan sebagai pengingat kepada para pelaksana implementasi supaya tidak lengah.
2. Sumberdaya manusia harus ditingkatkan, perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan khusus di instansi yang berkaitan dengan perkembangan IT sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

Daftar pustaka

- Ernawati, A., 2016, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD RAA Soewondo Pati", *Jurnal Litbang*, Vol. XII, No. 2, hal. 136-147
- Fernando, R. dan Marom, A., 2016, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 5 No. 2, hal. 1-13
- Maulidya, R.Y., 2018, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 27, Nomor 2, hal. 170-178
- Suwardi. 2019. *Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten*. Surakarta: Research Fair Unisri Vol.3 No.1.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta:
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.